

# Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera

Heru Wahyudi<sup>1</sup>, Abdirrohman<sup>2</sup>

Universitas Lampung<sup>1,2</sup>

[heru.wahyudi@feb.unila.ac.id](mailto:heru.wahyudi@feb.unila.ac.id)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 31 Agustus 2022

Revisi 1 pada 7 September 2022

Revisi 2 Pada 15 September 2022

Disetujui pada 24 September 2022

## Abstract

**Purpose:** This study aims to analyze the effect of economic inequality, open unemployment rate, poverty line, and crime clearance on criminal property rate in the provinces of Sumatra.

**Research methodology:** The analytical method used in this study is OLS (Ordinary Least Square). This study uses panel data from 2010 - 2019 in 10 provinces in Sumatra using the FEM (Fixed Effect Model) model.

**Results:** The results showed that the variables of economic inequality and poverty line had a positive significant effect on criminal property rate in Sumatra. Meanwhile, the open unemployment rate variable has a positive but not significant effect on criminal property rate in Sumatra, and the crime clearance has a significant negative effect on criminal property rate in Sumatra.

**Limitations:** The limitation in this study is the use of a less specific poverty line variable.

**Contribution:** The results obtained from this study are expected to be one of the references in making policy directions based on the data presented to adjust the right policies, especially to reduce the crime rate of theft on the island of Sumatra.

**Keywords:** *Economic inequality, Unemployment, Poverty, Crime theft, Panel data*

**How to cite:** Wahyudi, H., Abdirrohman, A. (2022). Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 129-142.

## 1. Pendahuluan

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Berbagai studi telah menunjukkan hubungan dan kaitan yang kuat antara kesenjangan dan ketimpangan dengan tingkat tindak pidana kriminalitas. Lederman (2002) menjelaskan bahwa semakin timpang suatu wilayah maka akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kriminalitas. Ketimpangan ekonomi pada umumnya diukur dengan melihat distribusi pendapatan perorangan menggunakan indeks gini rasio. Beberapa studi empiris menyatakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran jumlah pendapatan seseorang diantaranya pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, dalam indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah garis kemiskinan menjadi salah satu faktor pembentuknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2014) kemiskinan adalah seseorang yang sama sekali atau hampir tidak memiliki jaminan dan tidak bisa memperoleh pinjaman

untuk memulai usaha karena tidak sempurnanya pasar modal yang menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan subsisten atau pekerjaan berupah rendah, meskipun mereka dapat berbuat jauh lebih baik jika distribusi pendapatan yang lebih adil. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan jumlah atau hitungan perorangan dari orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (Todaro & Smith, 2014).



Gambar 1. Grafik Tingkat Kejahatan Pencurian, Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Penyelesaian Tindak Pidana dan Garis Kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa secara umum peningkatan tingkat ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, garis kemiskinan dan penurunan persentase penyelesaian tindak pidana diikuti dengan meningkatnya kejahatan pencurian. Seperti pada tahun 2012 variabel ketimpangan ekonomi 3,586 poin, pengangguran 39,11%, garis kemiskinan 302.142 rupiah perkapita dan persentase penyelesaian tindak pidana 44,6%, mengalami peningkatan di tahun 2013 untuk variabel ketimpangan ekonomi 3,592 poin, pengangguran 39,43%, garis kemiskinan 339.365 rupiah perkapita dan penurunan persentase penyelesaian tindak pidana 37,89% selaras dengan peningkatan tingkat kejahatan pencurian yang sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 50.873 kasus meningkatkan pada tahun 2013 sebanyak 52.789 kasus. Begitu juga pada saat trend menurun.

Upaya memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dengan mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Terciptanya dan terpenuhnyakeamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitasekonomi sehingga pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitasnasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainyapembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil danmakmur.

Sehingga analisis variabel tingkat kejahatan pencurian digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel tersebut dapat menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu syarat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Garis Kemiskinan dan Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera”.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

### *Landasan teori*

#### *Teori permintaan dan penawaran kejahatan*

Permintaan kejahatan terbentuk karena adanya peluang dan kesempatan melakukan tindak kejahatan, sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan adalah jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan, ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dan tingkat keamanan. Keseimbangan kejahatan terbentuk dari penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan diperoleh dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sedangkan permintaan kejahatan didapat dari permintaan masyarakat, kemudian pemerintah mempengaruhi keduanya (Becsi, 1999).

#### *Teori tingkah laku konsumen: teori nilai guna (utilitas)*

Menurut Sukirno(2016) nilai guna dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, Sir John R. Hicks telah mengembangkan satu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimalan kepuasan oleh konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas dengan analisis kurva kepuasan sama (*indifference curve*) dan garis anggaran pengeluaran (*budget line*). Berdasarkan analisis itu, dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Artinya apabila kurva kepuasan sama menunjukkan kebutuhan yang diinginkan berada di atas garis anggaran pengeluaran, maka konsumen akan meningkatkan utilitas dengan memperbesar pendapatan, apabila terdapat keterbatasan kemampuan dalam memenuhi peningkatan pendapatan maka seorang konsumen dapat melakukannya melalui aktivitas ilegal seperti tindak kejahatan. Menurut Fauziah(2019)dalam penelitiannya keputusan melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas maksimisasi utilitas.

### *Pengembangan hipotesis*

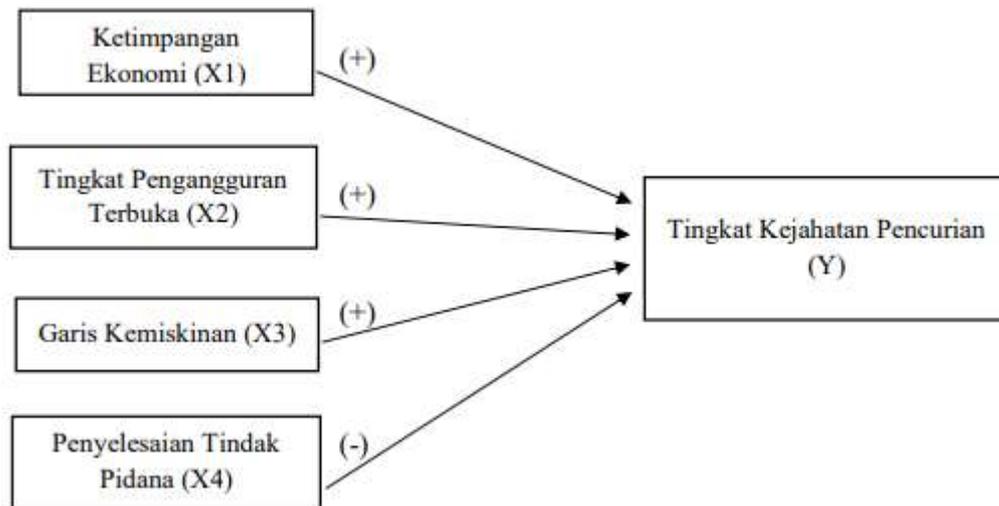
Menurut Sullivan (2012) dalam meningkatkan utilitas seseorang melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas maksimisasi utilitas pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman berada pada tingkatan kedua, sehingga permasalahan dari pembangunan ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan gangguan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang menimbulkan permasalahan keamanan dengan munculnya tindak kejahatan pencurian dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi.

Berdasarkan Becker (1968)menjelaskan bahwa faktor ketimpangan ekonomi menempatkan orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada suatu daerah. (Mehanna, 2004; Mehlum et al., 2006) Hal tersebut akan meningkatkan return dari aksi kejahatan sehingga tingkat kejahatan akan tinggi di daerah tersebut.

Menurut Melick (2003) orang yang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja, sehingga pengangguran memiliki hubungan positif dengan kejahatan properti atau pencurian. Tindakan kriminalitas didominasi oleh penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya menurut (Mehlum et al., 2006; Melick, 2003) meneliti bahwa seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih berpotensi melakukan tindakan ilegal karena tidak mendapatkan kesempatan berusaha dibandingkan dengan orang normal yang melakukan tindakan legal sehingga garis kemiskinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kejahatan pencurian.

Menurut Ehrlich(1996) yang dapat menggeser kurva permintaan dari keseimbangan kejahatan diantaranya adalah tingkat penyelesaian tindak pidana pada suatu daerah, sehingga secara teori variabel penyelesaian tindak pidana memiliki hubungan negatif dengan tingkat kejahatan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### 3. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependent*) yaitu tingkat kejahatan pencurian di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan variabel bebas (*independent*) yaitu ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana. Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan yakni data sekunder, berupa *time series data* dan *cross section* yang disebut juga sebagai data panel. Berikut adalah persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini.

$$\log PNC_{it} = \beta_0 + \beta_1 GINI_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 \log GK_{it} - \beta_4 PTP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- PNC<sub>it</sub> = Tingkat Kejahatan Pencurian
- GINI<sub>it</sub> = Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan
- TPT<sub>it</sub> = Tingkat pengangguran terbuka
- GK<sub>it</sub> = Garis kemiskinan
- PTP<sub>it</sub> = Penyelesaian Tindak Pidana
- B<sub>0</sub> = Konstanta
- β<sub>1,2,3,4</sub> = Koefisien
- i = Provinsi
- ε = Residual (error term)
- t = Waktu

Data *cross section* dalam penelitian ini merupakan data 10 provinsi di Pulau Sumatera dan data *time series* merupakan data dari 10 tahun terakhir yakni 2010 – 2019. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Tingkat Kejahatan Pencurian	Tingkat kejahatan pencurian ini sebagai variabel terikat yang diukur menggunakan data jumlah tindak kejahatan pencurian yang dilaporkan dengan satuan jumlah kasus.	$TKP = \frac{\text{Jumlah Kejahatan Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } t} \times 100.000$
Ketimpangan Ekonomi	Ketimpangan ekonomi ini sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di setiap Provinsi.	$KE = 1 - \frac{\text{Penerima Pendapatan (Jumlah kumulatif pendapatan - Jumlah kumulatif pendapatan}_{t-1})}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
Garis Kemiskinan	Garis kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan dalam bentuk satuan rupiah (Rp) per kapita.	$GK = \text{Garis Kemiskinan Makanan} + \text{Garis Kemiskinan Non Makanan}$
Penyelesaian Tindak Pidana	Penyelesaian tindak pidana ini merupakan data yang menunjukkan banyak jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan di suatu daerah.	$PTP = \frac{\text{Jumlah Kejahatan yang dapat diselesaikan oleh kepolisian dengan tindak pidana yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Kejahatan}} \times 100\%$

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### *Analisis statistik deskriptif*

Dalam menjelaskan hasil penelitian dari suatu objek dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis salah satunya deskriptif statistik. Deskriptif statistik terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), nilai paling kecil (*minimum*), nilai paling tinggi (*maximum*) serta nilai deviasi sebagai indikator yang menjelaskan penyebaran data pada penelitian.

Nilai Kejahatan Pencurian terkecil adalah 680 kasus di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018. Kemudian nilai terbesar diperoleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 18.034 kasus pada tahun 2013. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 4.535,940 kasus dan nilai deviasinya sebesar 3.971,724 kasus. Nilai Ketimpangan ekonomi terkecil adalah 0,262 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019. Kemudian nilai terbesar diperoleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,437 pada tahun 2014. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,337 dan nilai deviasinya sebesar 0,029.

Nilai pengangguran terkecil adalah 2,6% di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016. Kemudian nilai terbesar diperoleh Provinsi Aceh sebesar 10,12% pada tahun 2013. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 5,6527% dan nilai deviasinya sebesar 1,626211%. Nilai garis kemiskinan terkecil berada pada angka 238768.0 ribu perkapita di Provinsi Lampung pada tahun 2010. Kemudian nilai terbesar diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 677716.0 ribu perkapita pada tahun 2019. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 379925.5 ribu perkapita dan nilai deviasinya sebesar 92191.55 ribu perkapita.

Persentase penyelesaian tindak pidana terkecil berada pada angka 11.72% di Provinsi Lampung pada tahun 2013. Kemudian nilai terbesar diperoleh Provinsi Bengkulu sebesar 83.59% pada tahun 2018. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 49,475% dan nilai deviasinya sebesar 14.14835%. Penelitian ini melalui tahapan pengujian asumsi klasik diantaranya Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Autokorelasi.

### ***Pemilihan model regresi data panel***

Terdapat tiga pendekatan untuk memilih model dalam estimasi data panel diantaranya: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dalam menentukannya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	59.034969	(9,86)	0.0000*
Cross-section Chi-square	197.103168	9	0.0000

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.488970	4	0.0329*

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan hasil estimasi uji chow dan hausman yang telah dilakukan Model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan model *Random Effect* dan *Common Effect*, tanpa peneliti harus melakukan pengujian selanjutnya yakni Uji Lagrange Multiplier. Dengan dipilihnya model *fixed effect* sebagai model regresi, maka hasil estimasi regresi linier berganda dengan bentuk semi-log sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi Data Panel Pendekatan *Fixed Effect*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	2.283221	2.489333	0.917202	0.3616
GINI	5.108495	1.588487	3.215949	0.0018*
TPT	0.020495	0.032389	0.632782	0.5286
LOG_GK	0.331812	0.170241	1.949066	0.0545*
PTP	-0.005501	0.002346	-2.345224	0.0213*
R-squared	0.882395			
F-statistik	49.63570			

\*Signifikan pada level 5%

\*\*Signifikan pada level 10%

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

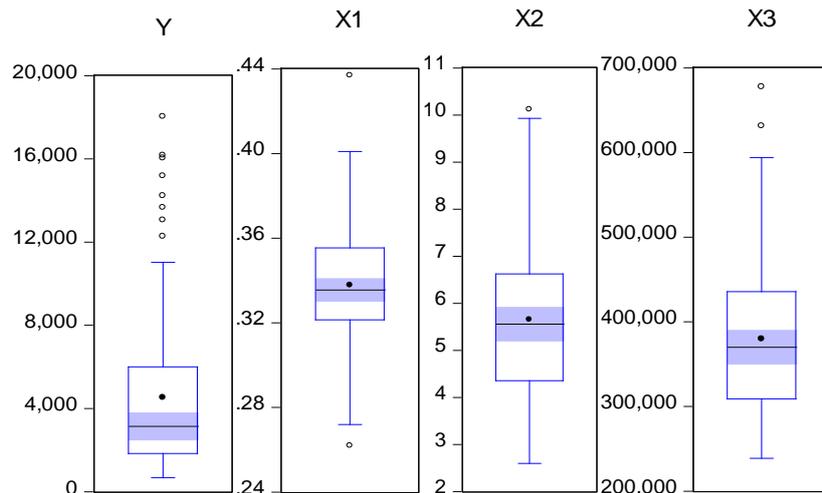
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 6, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LOG\_PNC}_{it} = 2.283221 + 5.108495 \text{GINI}_{it} + 0.020495 \text{TPT}_{it} + 0.331812 (\text{LOG\_GK}_{it}) - 0.005501 \text{PTP}_{it} \quad (2)$$

### Uji asumsi klasik

#### Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas terdistribusi normal atau tidak. Data dalam penelitian ini tidak normal, dikarenakan nilai probabilitas jarque-bera kurang dari  $\alpha$  5%. Menurut Widarjono (2018) apabila nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  5% maka data terdistribusi normal. Dengan demikian penelitian ini menggunakan *winsorizing*. *Winsorizing* adalah teknik di mana pengamatan dengan nilai ekstrem (*outlier*) diganti dengan persentil tertentu (Abbas & Badshah, 2015). Sebelum melakukan *winsorizing*, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi nilai *outlier* dengan menggunakan *boxplot*, dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa pengamatan dalam penelitian ini mengandung *outlier*, sebagaimana yang ditunjukkan gambar berikut.

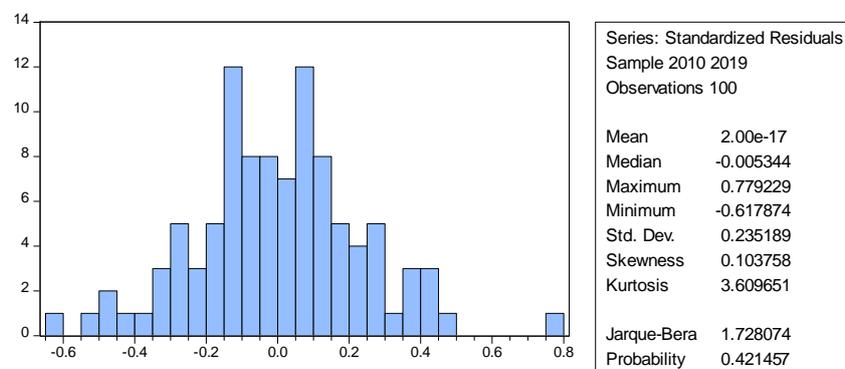


Gambar 3. *Boxplot sebelum winsorizing*

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan *outputboxplot* tersebut dapat dilihat bahwa di dalam variabel Y(Tingkat Kejahatan Pencurian), X1(Ketimpangan Ekonomi), X2(Tingkat Pengangguran Terbuka), X3(Garis Kemiskinan) dan X4(Penyelesaian Tindak Pidana) terdapat nilai ekstrem (*outlier*). Oleh karena itu perlu dilakukan *winsorizing* data pada kelima variabel tersebut. Dalam penelitian, peneliti me-*winsorize* 5% setiap ekor (*tail*) untuk variabel X1, X2 dan X3, sedangkan untuk variabel Y1 peneliti me-*winsorize* 10% setiap ekor (*tail*) dan variabel X4 peneliti me-*winsorize* 0,25% setiap ekor (*tail*).

Berdasarkan *output boxplot* setelah dilakukan *winsorizing* kelima variabel sudah terbebas dari nilai ekstrim (*outlier*). Kemudian menguji ulang data penelitian berdasarkan asumsi normalitas, dan didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terlihat pada Gambar 4 bahwa nilai *P-value* Jarque-Bera sebesar 0,421457 dimana lebih besar dari pada ( $\alpha$ ) 5 persen (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini data terdistribusi normal.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat konstan atau tidaknya residual dari suatu model. Suatu model yang dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila varians dari setiap residualnya bersifat konstan. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Glesjer yaitu dengan meregresikan nilai mutlaknya dengan variabel independen. Berikut adalah output hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.499521	1.655951	0.301652	0.7636*
GINI	-1.340102	1.056691	-1.268205	0.2081*
TPT	-0.037231	0.021546	-1.727958	0.0876*
LOG_GK	0.029678	0.113248	0.262065	0.7939*
PTP	-0.000232	0.001560	-0.148830	0.8820*

\*Signifikan pada level 5%

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan hasil estimasi uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan pada Tabel 2, didapatkan probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari nilai  $\alpha$  5%. Yang mana nilai probabilitas GINI sebesar 0,2081 lebih besar dari 0,05, kemudian TPT sebesar 0,0876 lebih besar dari 0,05, GK sebesar 0,7939 lebih besar dari 0,05 dan PTP sebesar 0,8820 lebih besar dari 0,05. Nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  5% maka data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk mendekeksi korelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini untuk mendeteksi multikolinieritas menggunakan pengujian Pearson Correlation. Dengan kriterianya adalah jika nilai koefisien antar variabelnya melebihi 0,8 maka bisa dikatakan terjadi koefisien korelasi antar variabel dalam model (Gujarati, 2009).

Tabel 6 Deteksi Multikolinieritas

	GINI	TPT	GK	PTP
GINI	1.000000	-0.041841	-0.335092	0.035300
TPT	-0.041841	1.000000	-0.148277	-0.318581
LOG_GK	-0.335092	-0.148277	1.000000	0.250543
PTP	0.035300	-0.318581	0.250543	1.000000

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan hasil estimasi deteksi multikolinieritas yang telah dilakukan pada Tabel 6, didapatkan koefisien antar variabelnya lebih kecil dari 0,8 maka bisa dikatakan tidak terjadi koefisien korelasi antar variabel dalam model.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antar variabel. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson.



Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson 2,140199. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak ada autokorelasi negatif maupun positif ( $dU < d < 4-dU$ ). Pengujian autokorelasi ini dilakukan sudah dalam bentuk variabel persamaan logaritma.

### Pengujian Statistik

#### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari probabilitasnya terhadap  $\alpha$  dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 dan derajat kebebasan (df). Pengujian ini berdasarkan pada nilai positif dan negatif. Hasil pengujian regresi secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji t-statistik

Variabel	t-statistik	t-tabel ( $\alpha=5\%$ )	Keterangan
GINI	3,215949	1,661	Signifikan
TPT	0,632782	1,661	Tidak Signifikan
LOG_GK	1,949066	1,661	Signifikan
PTP	-2,345224	1,661	Signifikan

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan hasil uji t-statistik variabel ketimpangan ekonomi, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian.

#### Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil pengujian F – statistik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji F - Statistik

$df(k-1;n-k)$	$\alpha$	F – statistik	F – tabel	Keterangan
4 ; 95	5%	49,63570	2,47	Signifikan

Sumber: Data diproses menggunakan Eviews (2022)

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil uji F-statistik sebesar 49,63570. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel yaitu sebesar 2,47 pada tingkat signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan atau  $df(\text{degree of freedom}) = 4; 95$ . Hal ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

### *Koefisien determinasi ( $R^2$ )*

Nilai koefisien determinasi yang kecil dalam arti mendekati nilai nol maka kemampuan variabel bebas dalam variabel terikat cukup terbatas. Dan sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan informasi dengan baik terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan regresi model *fixed effect* yang telah dipaparkan sebelumnya pada tabel, bahwa koefisien determinasinya sebesar 0,880176. Hal ini dapat diartikan bahwa 88,23% variabel bebas dapat menjelaskan tingkat pencurian di Pulau Sumatera. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11,77% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

### **Pembahasan**

#### *Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera*

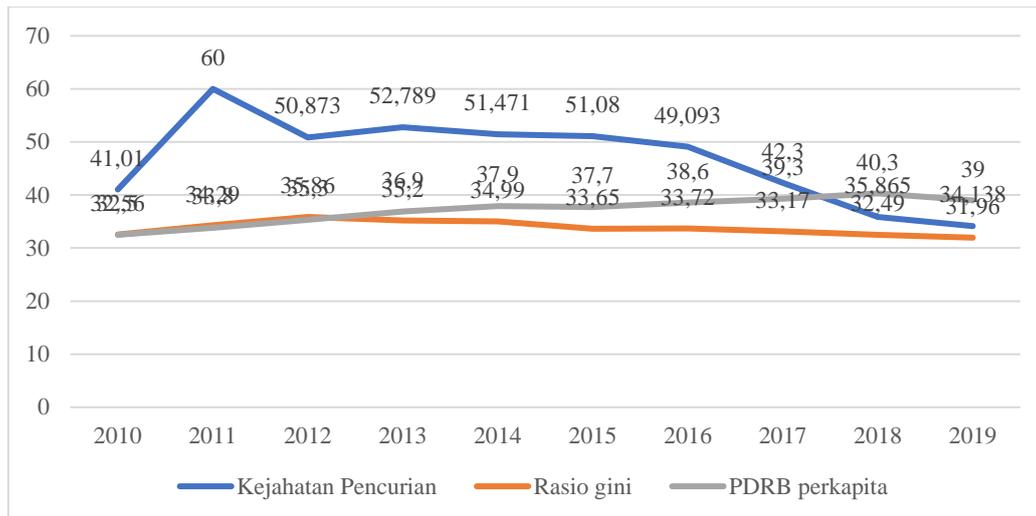
Pada variabel pengangguran ini hubungannya dengan kejahatan pencurian dikatakan inelastis karena nilai elastisitasnya sebesar 0,020495 yakni  $< 1$ . Artinya ketika tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan maka tingkat kejahatan pencurian tidak naik sebesar tingkat pengangguran terbuka yang berarti jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan sehingga jumlah orang yang menganggur berkurang.

Dapat diartikan pula perubahan yang terjadi pada variabel kejahatan pencurian akan lebih kecil dibandingkan perubahan yang terjadi pada variabel pengangguran. Tidak signifikannya suatu variabel bukan berarti variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap variabel kejahatan pencurian. Hanya saja sampel penelitian tidak berhasil membuktikan teori yang ada. Teori mengatakan pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kejahatan pencurian.

Menurut Teori Permintaan dan penawaran kejahatan yang dikemukakan oleh Becsi(1999) tingkat pengangguran yang bersifat positif terhadap kejahatan pencurian bisa disebabkan karena peluang seseorang dalam melakukan pencurian terbuka lebar karena didukungnya kebutuhan yang perlu dipenuhi dan peluang melakukan kejahatan karena tidak ada resiko pekerjaan yang perlu dikorbankan.

Menurut Sabiq & Apsari, (2021) dampak dari pengangguran yang dapat menyebabkan tindakan kriminal. Biaya pemenjaraan berupa *opportunity cost* pendapatan legal yang hilang juga sangat kecil bagi seorang pengangguran. Hal ini menimbulkan insentif bagi orang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian menurut Priatna (2016) bisa dikarenakan persentase pengangguran terbuka didominasi oleh *fresh graduation* atau para lulusan baru yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang-jenjang tertentu sehingga mereka belum mendapatkan pekerjaan terlebih lagi di setiap tahun para lulusan baru ini terus bertambah dan banyak dari mereka yang masih tinggal bersama orang tuanya sehingga walaupun belum mendapat pekerjaan, kehidupan ekonomi mereka masih dapat terpenuhi melalui orang tuanya. Selain itu, dimungkinkan tingkat pengangguran tersebut merupakan pengangguran yang termasuk dalam pengangguran friksional di mana pengangguran ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagai akibat keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Selain itu, tingkat pengangguran bersifat positif terhadap tingkat kejahatan pencurian juga diperkuat jumlah angka partisipasi sekolah dengan rentang umur 19-24 yang tinggi menyebabkan tingkat pengangguran rendah sehingga menurunkan jumlah kejahatan pencurian. Berikut grafik kejahatan pencurian, angka partisipasi sekolah dan pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.



Gambar 6. Grafik kejahatan pencurian, angka partisipasi sekolah dan pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Gambar 6 dapat kita simpulkan meningkatnya angka partisipasi sekolah dalam kategori umur 19-24 menyebabkan tingkat pengangguran rendah sehingga menurunkan jumlah kejahatan pencurian. Selain kedua faktor tersebut tidak signifikannya pengaruh pengangguran terhadap kejahatan pencurian dapat dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian di luar penelitian ini. Implikasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yakni meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan memenuhi fasilitas pendidikan dan pemerataannya di setiap daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap para lulusan pendidikan sehingga menekan tingkat pengangguran yang akan menurunkan tingkat kejahatan pencurian.

#### *Pengaruh garis kemiskinan terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera*

Pada variabel garis kemiskinan ini hubungannya dengan kejahatan pencurian dikatakan inelastis karena nilai elastisitasnya sebesar 0,331812 yakni  $< 1$ . Artinya ketika garis kemiskinan mengalami kenaikan maka tingkat kejahatan pencurian tidak naik sebesar garis kemiskinan yang berarti pengeluaran orang miskin juga mengalami kenaikan sehingga jumlah kemiskinan berkurang. Dapat diartikan pula perubahan yang terjadi pada variabel kejahatan pencurian akan lebih kecil dibandingkan perubahan yang terjadi pada variabel garis kemiskinan.

Menurut Hendri(2014) dalam konteks penurunan jumlah penduduk miskin, yang berarti ada kenaikan proporsi penduduk dengan jumlah pendapatan di atas ambang garis kemiskinan, tidak cukup menjadi pemicu penurunan jumlah kejahatan pencurian, sehingga pengaruh garis kemiskinan terhadap tingkat kejahatan pencurian sangat dimungkinkan dengan melihat distribusi pendapatan. Karena garis kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan tingginya kejahatan pencurian apabila diikuti dengan tingginya indeks gini atau ketimpangan distribusi pendapatan dan tingginya PDRB perkapita.

Becsi (1999) mendalilkan bahwa keputusan individu apakah menjadi kriminal atau tidak didasarkan pada target tingkat konsumsi yang dicita-citakan setiap individu untuk mencapainya. Jika seseorang tidak dapat mencapai tingkat konsumsi yang diinginkan melalui jalur hukum, ia mungkin dapat melakukannya dengan kegiatan kriminal. Peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh PDRB perkapita yang tinggi namun tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang terbuka dan rendahnya indeks gini pendapatan akan menyebabkan tingkat kejahatan pencurian yang tinggi karena target tingkat konsumsi tidak dapat tercapai. Artinya dari temuan analisis diatas dapat diimplikasikan dalam kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yakni pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan fasilitas

pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan agar angka pengangguran dapat ditekan lalu distribusi pendapatan dapat lebih merata sehingga jumlah penduduk miskin dapat menurun dan tingkat kejahatan pencurian mengalami penurunan.

#### *Pengaruh penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera*

Pada variabel penyelesaian tindak pidana ini hubungannya dengan kejahatan pencurian dikatakan inelastis karena nilai elastisitasnya sebesar (-0,005501) yakni  $< 1$ . Artinya ketika penyelesaian tindak pidana mengalami kenaikan maka tingkat kejahatan pencurian tidak turun sebesar kenaikan persentase penyelesaian tindak pidana yang berarti bertambahnya pelaku kejahatan yang ditangkap mengakibatkan meningkatnya ketimpangan ekonomi, pengangguran dan garis kemiskinan yang disebabkan tertangkapnya seseorang menjadikan anggota keluarga lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna dan merata. Dapat diartikan pula perubahan yang terjadi pada variabel kejahatan pencurian akan lebih kecil dibandingkan perubahan yang terjadi pada variabel penyelesaian tindak pidana.

Dengan nilai probabilitas garis kemiskinan terbuka sebesar 0,0213 dengan taraf nyata 5%, penyelesaian tindak pidana berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada tingkat ketimpangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga hipotesis diterima.

Merujuk pada penelitian Becsi(1999) dalam kerangka sederhana, keseimbangan kejahatan terbentuk dari penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan diperoleh dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sedangkan permintaan kejahatan didapat dari permintaan masyarakat, kemudian pemerintah mempengaruhi keduanya. Artinya dari temuan analisis diatas dapat diketahui bahwa variabel penyelesaian tindak pidana merupakan bagian dari faktor pendorong dari sisi permintaan kejahatan, sehingga dapat diimplikasikan dalam kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yakni peningkatan kualitas aparat keamanan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana, sehingga tingkat kejahatan pencurian dapat ditekan.

#### *Pengaruh ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka dan garis kemiskinan terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera*

Dalam penelitian ini, didapatkan hasil uji F-statistik sebesar 49,63570 nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel yaitu sebesar 2,47 pada tingkat signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan atau  $df$  (*degree of freedom*) = 96. Dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Hendri(2014) secara bersama-sama ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dapat menjadi pemicu penurunan jumlah kejahatan pencurian dengan diikuti perubahan pada garis kemiskinan serta adanya efek pengangguran yang secara signifikan mempengaruhi angka kejahatan pencurian.

Dari simpulan temuan penelitian di atas dapat diimplikasikan dalam kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penawaran dan permintaan kejahatan, yakni menjalankan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi, dengan negara – negara yang tergabung dalam program SDGs ini.

Apabila kemiskinan dan ketimpangan yang dituntaskan akan berdampak pada tingkat kejahatan pencurian yang dapat dikendalikan, karena kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan pencurian. Apabila tindak

kejahatan pencurian dapat dikendalikan maka akan memenuhi upaya untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang merupakan langkah strategis dalam memengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDGs)*.

## 5. Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi, garis kemiskinan berpengaruh positif secara signifikan dan penyelesaian tindak pidana berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019. Serta ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

### *Limitasi dan Studi Lanjutan*

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel garis kemiskinan yang kurang spesifik. Pada penelitian selanjutnya apabila ingin menggunakan variabel garis kemiskinan diharapkan dapat melakukan estimasi dengan menggunakan sampel data kemiskinan yang lebih spesifik agar diperoleh hasil yang lebih akurat, karena garis kemiskinan belum menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### Ucapan Terima Kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kami segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Meskipun Artikel saya masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

### Referensi

- Abbas, M., & Badshah, I. (2015). Preferences of Institutional Investors at Karachi Stock Exchange. *Int'l Conference on Business, Marketing & Information System Management, 2004*, 1–4. <https://doi.org/10.15242/icehm.ed1115006>
- Becker, Gary S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *The American Journal of Surgery*.
- Becsi, Z. (1999). *Economics and Crime in the States*.
- Ehrlich, I. (1996). Crime, Punishment, and the Market for Offenses. *Journal of Economic Perspectives*.
- Fauziah, R. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kriminalitas Properti di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah*, 9–11. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/5731/5032&ved=2ahUKEwjQwcPFh-ryAhXzIbcAHYqCBUwQFnoECAQQAQ&usq=AOvVaw3JLLFmUVHTYyB6UTdN80En>
- Gujarati, D. (2009). *Basic Econometrics* (Noelle Fox (ed.); 5th Editio). McGraw-Hill.
- Hendri, D. (2014). Kriminalitas : Sebuah Sisi Gelap dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan ( Crime : A Dark Side of Income Inequality ). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Lederman, D., Fajnzylber, P., & Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. *Journal of Law and Economics*, 45(1 I), 1–40. <https://doi.org/10.1086/338347>
- Mehanna, R.-A. (2004). Poverty and Economic Development: Not as Direct as It May Seem. *Journal of Socio-Economics*.
- Mehlum, Halvor, Miguel, E., & Torvik, R. (2006). Poverty and Crime in 19th Century Germany. *Journal of Urban Economics*.
- Melick, M. (2003). The Relationship between Crime and Unemployment. *The Park Place Economist*.
- Priatna, Y. Y. (2016). *Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010- 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau

- Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51.  
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: teori pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sullivan, A. (2012). *Urban Economics*. McGraw-Hill.
- Todaro, M. . P., & Smith, S. C. (2014). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertasi Panduan EViews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.